



DIPLOMASI PERTAHANAN FILIPINA UNTUK CAPACITY BUILDING DI TENGAH PERSAINGAN AS-TIONGKOK

Dyah Apriliana Chandra Dewi, Rodon Pedrason, Anak Agung Banyu Perwita

Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

Abstrak

Penelitian ini mengkaji diplomasi pertahanan Filipina dalam membangun kapasitas di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan data sekunder, penelitian ini mengeksplorasi strategi diplomasi pertahanan Filipina, termasuk penerapan strategi lindung nilai dalam menjaga keseimbangan di antara dua kekuatan besar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Filipina mengelola persaingan Amerika Serikat-Tiongkok dengan mempertahankan aliansi dengan kedua negara sambil menyeimbangkan tujuan mereka yang berbeda. Filipina memanfaatkan hubungan ekonomi dengan Cina melalui Belt and Road Initiative dan kemitraan dengan Amerika Serikat melalui perluasan EDCA. Strategi ini memungkinkan Filipina untuk mempertahankan kemandiriannya dan mencegah ketergantungan yang berlebihan pada salah satu negara besar. Pembangunan kapasitas pertahanan Filipina berpusat pada peningkatan kemampuan melalui partisipasi regional, modernisasi, dan aliansi.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Pembangunan Kapasitas, Persaingan AS-Tiongkok, Strategi Hedging, Filipina.

PENDAHULUAN

Belakangan ini, dinamika geopolitik global telah mengalami transformasi yang signifikan karena meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang diakui sebagai dua kekuatan global terkemuka. Persaingan antara negara-negara besar ini telah secara signifikan

memengaruhi interaksi pertahanan di antara negara-negara, yang mengarah pada perubahan prosedur diplomasi pertahanan dalam skala global.

Negara-negara modern menghadapi tantangan karena situasi yang tidak pasti dan selalu berubah-ubah dengan melihat dinamika perkembangan global, sehingga mendorong mereka untuk merumuskan dan menyesuaikan

*Correspondence Address : cdyahapriliana@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i3.2024. 509-515

© 2024UM-Tapsel Press

kebijakan pertahanan mereka. *Capacity building* tidak terkecuali, yang juga merupakan kebutuhan strategis bagi negara-negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka dalam lingkungan yang berubah.

Filipina menampilkan dirinya sebagai studi kasus yang menarik dalam jaringan dinamika kekuatan global yang kompleks. Negara yang bersangkutan, yang terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari beberapa pulau, telah sangat menyadari kompleksitas dan tantangan yang timbul dari persaingan antara Amerika Serikat dan Cina, mengingat posisi strategisnya di persimpangan kepentingan geopolitik mereka. Kedudukan strategis Filipina di Laut Cina Selatan menjadikannya sebagai titik pusat dalam pertarungan pengaruh antara dua kekuatan besar tersebut. Sumber daya alam yang melimpah dan posisinya yang vital telah membuat Filipina menjadi subjek dalam strategi geopolitik regional dan global.



Gambar 1: Model Teori Strategi

Sumber: United States Army War College, 2018

Strategi adalah penyelarasan *ends*, *ways*, dan *means* untuk mencapai tujuan. Bangku berkaki tiga adalah cara mudah untuk menunjukkan bagaimana hubungan itu bekerja. Jika *goals*, *ways*, dan *means* berada dalam keseimbangan yang baik, maka strategi tersebut mungkin layak (Johnsen, 2018). Pada Gambar 1, model tersebut mengilustrasikan $Strategy = Ends + Means + Ways$. Ketika ketiga dasar tersebut tidak seimbang, maka akan meningkatkan risiko dalam menerapkan

strategi tersebut. Dari model di atas, tujuan adalah *ends*, konsep adalah *ways* untuk mencapai tujuan dan sumber daya adalah *means* untuk mendukung cara yang dilakukan (Hasyim *et al.*, 2021).

Cottey dan Forster (2004) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan kerja sama angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait (terutama kementerian pertahanan) pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan.

Sedangkan Mehta (2018) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan terutama oleh perwakilan kementerian pertahanan, serta lembaga-lembaga negara lainnya, yang bertujuan untuk mengejar kepentingan kebijakan luar negeri negara di bidang kebijakan keamanan dan pertahanan, dan yang tindakannya didasarkan pada penggunaan negosiasi dan instrumen diplomatik lainnya.

Dalam prakteknya, diplomasi pertahanan sering kali melibatkan kerjasama militer, penjualan alutsista, latihan bersama, pertukaran intelijen, dan diplomasi keamanan. Ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari dialog bilateral antara negara-negara, hingga partisipasi dalam forum multilateral atau organisasi keamanan internasional.

Diplomasi pertahanan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan stabilitas regional dan global, serta dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang muncul, seperti terorisme, konflik bersenjata, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Selain itu, diplomasi pertahanan juga memainkan peran strategis dalam membangun dan memperkuat aliansi, serta dalam menanggapi perubahan dinamika kekuatan global.

Definisi lainnya adalah bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan sumber daya pertahanan tanpa kekerasan untuk mengejar tujuan

kebijakan luar negeri dan/atau pertahanan nasional yang merupakan bagian dari diplomasi negara secara keseluruhan (Pedrason & Montratama, 2023). Pendekatan ini mengakui bahwa keamanan dan stabilitas global tidak hanya dapat dicapai melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui hubungan diplomatik yang efektif dan kerjasama antar negara. Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara dapat membangun hubungan yang lebih erat, meningkatkan kepercayaan, dan mengurangi ketegangan, yang pada gilirannya membantu dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur secara damai dan kooperatif, sebagian besar oleh komponen pertahanan, untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan serta mencakup pembicaraan dan alat diplomatik, dengan fokus pada cara-cara damai untuk melindungi dan mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.

Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Kanni, 2009). Sementara pengembangan kapasitas dapat dikatakan sebagai proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, masyarakat, dan bahkan negara-bangsa meningkatkan kemampuan mereka untuk pertama-tama menjalankan fungsi-fungsi inti, memecahkan masalah, mendefinisikan dan mencapai tujuan; dan kedua, memahami dan menangani kebutuhan pembangunan mereka dalam konteks yang luas dan dengan cara yang berkelanjutan (OECD, 2011).

Pengembangan kapasitas adalah penting dalam berbagai bidang, dari

pengembangan ekonomi hingga pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan sektor nirlaba. Ini sering melibatkan pelatihan, mentoring, dukungan teknis, dan transfer pengetahuan, serta perubahan kebijakan dan praktek yang memungkinkan organisasi atau negara untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru. Pengembangan kapasitas yang efektif membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya memperkuat keterampilan individu tetapi juga memperbaiki sistem dan struktur yang mendukung mereka. Ini adalah proses berkelanjutan yang memungkinkan organisasi atau negara untuk tetap relevan dan efektif dalam lingkungan yang cepat berubah.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, diplomasi pertahanan untuk peningkatan kapasitas dapat secara singkat didefinisikan sebagai penggunaan kolaboratif angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait, terutama yang dipimpin oleh kementerian pertahanan dan lembaga-lembaga negara lainnya, untuk meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi inti pertahanan secara efektif dan berkelanjutan, memecahkan tantangan keamanan, dan mencapai kepentingan kebijakan luar negeri. Hal ini melibatkan penggunaan negosiasi dan instrumen diplomatik untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara damai dan menyelaraskannya dengan tujuan nasional yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk mengkaji *defense diplomacy for capacity building* yang dilakukan oleh Filipina di tengah persaingan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok, di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini didasarkan pada data

sekunder termasuk artikel ilmiah, makalah penelitian, jurnal, laporan, situs web, dan sumber informasi internasional terkemuka. Konsep strategi, diplomasi pertahanan, dan pengembangan kapasitas menjadi dasar bagaimana sebuah negara mengambil sikap dalam hubungan internasional demi kepentingan dan eksistensi nasionalnya. Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis strategi diplomasi pertahanan Filipina di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

The Ends

Strategi diplomasi pertahanan Filipina berpijak pada upaya mencapai tujuan akhir: menegakkan keamanan nasional dan menjaga kedaulatan. Di bawah bayang-bayang persaingan A.S.-Tiongkok, para pemimpin negara ini menyadari bahwa postur pertahanan yang kuat bukan hanya masalah pilihan tetapi juga keharusan untuk melindungi kepentingan negara mereka.

Bagi negara dan rakyat Filipina, keamanan nasional didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi di mana kedaulatan dan integritas teritorial negara, kesejahteraan rakyat, nilai-nilai inti, dan cara hidup, serta Negara dan lembaga-lembaganya, dilindungi dan ditingkatkan. Keamanan nasional Filipina ditopang oleh tiga pilar utama: (1) menjaga persatuan nasional Filipina, demokrasi, dan lembaga-lembaga sosialnya; (2) memastikan keamanan negara dan melestarikan serta melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan lembaga-lembaganya; (3) perlindungan rakyat dari segala bentuk ancaman, baik di dalam maupun di luar negeri (Strategi Keamanan Nasional 2018, n.d.).

Tiga pilar utama yang menjadi fondasi keamanan nasionalnya yaitu menjaga persatuan nasional dan demokrasi, memastikan keamanan

negara, serta melindungi rakyat dari ancaman menyoroti pendekatan komprehensif yang diambil oleh Filipina dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraannya.

Pilar pertama, menjaga persatuan nasional, demokrasi, dan lembaga-lembaga sosialnya, menekankan pentingnya kohesi sosial dan politik di dalam negara. Ini mengakui bahwa stabilitas internal dan keberlanjutan demokrasi adalah kunci untuk keamanan nasional. Pilar ini juga mencakup upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis dan sosial, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan.

Pilar kedua, yang berfokus pada keamanan negara serta pelestarian kedaulatan dan integritas teritorial, mencerminkan pentingnya pertahanan terhadap ancaman eksternal. Filipina, dengan letak geografisnya yang strategis, menghadapi berbagai tantangan, termasuk klaim teritorial dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan dan luar negeri Filipina dirancang untuk memperkuat posisi negara di panggung internasional dan menjaga kedaulatan wilayahnya.

Pilar ketiga, perlindungan rakyat dari segala bentuk ancaman, baik di dalam maupun di luar negeri, menyoroti komitmen Filipina untuk melindungi warganya. Ini tidak hanya mencakup aspek militer dan pertahanan, tetapi juga kebijakan yang berhubungan dengan keamanan sipil, seperti pemberantasan terorisme, keamanan siber, dan respons terhadap bencana alam.

Melalui pendekatan berlapis ini, Filipina berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, yang penting bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik negara. Strategi ini juga menunjukkan kesadaran Filipina akan pentingnya kerjasama regional dan internasional dalam mengatasi tantangan keamanan global.

Meskipun dinyatakan dalam Strategi Keamanan Nasional 2018 bahwa kepentingan nasionalnya, dalam hirarki prioritas mereka, di bawah ini adalah inti daripada kepentingan nasional Filipina:

- Perlindungan terhadap kebebasan, keamanan publik dan kesejahteraan rakyat.
- Mengakhiri semua konflik bersenjata internal yaitu pemberontakan komunis, ekstremisme kekerasan dan terorisme.
- Mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah nasional.
- Menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dalam pelaksanaan kedaulatan nasional dan penentuan nasib sendiri.
- Menjalankan dan mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
- Perlindungan masyarakat Filipina dari kriminalitas, obat-obatan terlarang, pandemi, serangan siber, dan senjata pemusnah massal.
- Kebebasan dari segala bentuk senjata nuklir di wilayah Filipina.
- Perlindungan dan pelestarian keseimbangan ekologi.
- Memajukan kohesi sosial dan persatuan nasional.

Dalam menganalisis arah dan praktik dari strategi keamanan nasional 2018 Filipina merupakan pendekatan holistik dan terintegrasi terhadap keamanan nasional yang mengakui dan menanggapi berbagai aspek yang terlibat. Pendekatannya yang multidimensi terhadap keamanan nasional menunjukkan pemahaman

bahwa keamanan melampaui aspek militer, mencakup faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik.

Komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat menegaskan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia, sementara usaha untuk menyelesaikan konflik bersenjata internal dan mempromosikan persatuan nasional menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan perdamaian internal.

Penekanan pada kedaulatan dan integritas wilayah mencerminkan kesadaran terhadap ancaman eksternal, penting dalam konteks geografis Filipina. Strategi ini juga menunjukkan keinginan Filipina untuk mempertahankan kedaulatan keputusan politiknya di panggung global, melalui kebijakan luar negeri yang independen dan otonom.

Pembangunan ekonomi yang inklusif diakui sebagai komponen penting dari keamanan nasional, mengindikasikan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mempromosikan dalam pembangunan berkelanjutan.

Respons terhadap ancaman non-tradisional seperti kriminalitas, pandemi, dan serangan siber menunjukkan pemahaman tentang kompleksitas keamanan global kontemporer. Komitmen terhadap lingkungan dan bebas senjata nuklir mencerminkan tanggung jawab Filipina terhadap isu-isu global dan kesadaran akan dampak lingkungan terhadap keamanan nasional.

Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional sambil mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konsep keamanan nasional yang luas dan kompleks.

The Ways

Negara-negara kecil memiliki tiga pilihan strategis ketika mereka

dihadapkan pada kekuatan yang meningkat: *balancing*, *bandwagoning* dan *hedging* (Wang & Tan, 2021). *Bandwagoning* terjadi ketika sebuah negara memilih untuk beradaptasi secara strategis terhadap kekuatan yang mengancam untuk membatasi ancaman, menetralsirnya, atau mengambil keuntungan dari distribusi kekuasaan yang baru (Goh, 2005).

Menurut Walt, (1985) dalam mengartikan istilah *bandwagoning* sebagai lawan dari *balancing*, yang berarti bahwa *bandwagoning* lebih memilih untuk bergabung bersama dalam koalisi yang lebih kuat. Sedangkan *hedging*, didefinisikan oleh Goh (2005) sebagai strategi untuk menghindari situasi ketika negara tidak menyeimbangkan atau ikut-ikutan.

Dari beberapa pendapat di atas, menjelaskan bahwa negara-negara kecil dihadapkan pada pilihan strategis yang kompleks dalam konteks politik global akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk persepsi mereka terhadap ancaman, sejarah hubungan internasional, kapasitas dan kemampuan mereka, serta tujuan jangka panjang mereka dalam politik internasional. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan keamanan dan politik luar negeri mereka tetapi juga mempengaruhi posisi mereka di panggung dunia.

Dalam hal Filipina, negara ini telah menggunakan strategi *hedging* dalam menghadapi persaingan AS-Tiongkok. Meskipun Filipina mempertahankan aliansi jangka panjang dengan Amerika Serikat, Filipina juga berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Cina karena kedekatan geografis dan hubungan ekonomi. Filipina telah berhati-hati untuk mempertahankan otonomi dan tidak terlalu bergantung pada keduanya.

Pendekatan ini mencerminkan usaha Filipina untuk mempertahankan otonomi dalam kebijakan luar negerinya,

berusaha untuk tidak terlalu bergantung pada salah satu kekuatan besar tersebut. Melalui strategi *hedging*, Filipina menunjukkan keinginannya untuk menyeimbangkan kepentingannya antara dua negara besar ini, sambil menghindari terjebak dalam konflik kepentingan mereka. Strategi ini memerlukan navigasi yang hati-hati, terutama dalam menangani isu sensitif seperti klaim teritorial di Laut Cina Selatan, dan menuntut fleksibilitas serta respons yang dinamis terhadap perubahan kondisi geopolitik. Kesuksesan strategi *hedging* Filipina akan bergantung pada kemampuannya untuk mengevaluasi dan merespons secara efektif terhadap ancaman dan peluang yang muncul dalam lingkungan global yang terus berubah. Pendekatan ini menunjukkan usaha Filipina untuk menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan dua kekuatan dunia ini, dalam rangka mempertahankan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Filipina dalam menjaga hubungan dengan AS dan Cina sambil secara hati-hati menavigasi antara kepentingan mereka yang saling bertentangan sejalan dengan strategi lindung nilai. Negara ini berusaha memanfaatkan keuntungan dari aliansinya dengan AS (karena mereka menyetujui perluasan EDCA) dan juga mengambil manfaat dari hubungan ekonomi dengan Tiongkok (karena Filipina telah setuju untuk berpartisipasi dalam *Belt and Road Initiative*).

Selain melakukan *hedging* di antara dua kekuatan besar, Filipina juga terus memastikan keterlibatan di bawah diplomasi pertahanan dengan negara-negara baik secara bilateral maupun di kawasan regional, seperti A.S., Filipina dan Australia memiliki *Status of Forces Agreement* (SOFA) yang menetapkan kerangka hukum dan operasional untuk hubungan militer mereka.

Filipina dan Jepang mengadakan Forum Industri Pertahanan Filipina-Jepang yang pertama. Forum ini membahas tentang pembelian dan penjualan senjata pertahanan, material, dan teknologi yang dibutuhkan untuk program Filipina dalam memodernisasi militernya. Di sisi lain, hubungan keamanan Filipina dengan Korea Selatan berpusat pada program modernisasi militer, yang bertujuan untuk memudahkan Filipina membeli senjata dari perusahaan Korea Selatan. Dan dalam kerangka regional, Filipina terus mengambil bagian dalam platform diplomasi pertahanan ASEAN, seperti ADMM, ADMM-Plus, NADI, dan banyak kegiatan diplomasi pertahanan regional lainnya (Castillo, 2021).

Perlunya menganalisis bagaimana Filipina secara strategis memperkuat dan mendiversifikasi kemitraan pertahanan serta modernisasi militernya. Pertama, Forum Industri Pertahanan Filipina-Jepang merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan pertahanan dengan Jepang. Forum ini, yang berfokus pada pembelian dan penjualan senjata, material, dan teknologi pertahanan, menunjukkan keinginan Filipina untuk mendapatkan akses ke teknologi militer yang lebih maju dan modern, yang sangat penting dalam proses modernisasi militernya. Kerjasama ini juga mencerminkan kepercayaan yang semakin meningkat antara Filipina dan Jepang, negara yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik.

Kedua, hubungan keamanan Filipina dengan Korea Selatan, yang berfokus pada modernisasi militer, menunjukkan upaya Filipina untuk memperluas sumber persenjataan dan teknologi militernya. Program ini memudahkan Filipina untuk membeli senjata dari perusahaan Korea Selatan, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan

Filipina dan mengurangi ketergantungan pada sumber tradisional.

Ketiga, keterlibatan Filipina dalam platform diplomasi pertahanan ASEAN seperti ADMM (ASEAN Defence Ministers' Meeting), ADMM-Plus, dan NADI (Network of ASEAN Defence and Security Institutions) menunjukkan komitmen Filipina terhadap kerjasama pertahanan regional. Ini mencerminkan pengakuan Filipina atas pentingnya kerjasama regional dalam mengatasi tantangan keamanan bersama dan memperkuat stabilitas di kawasan.

Latar belakang dari perkembangan ini adalah kebutuhan Filipina untuk mengatasi tantangan keamanan internal dan regional, serta menjawab dinamika geopolitik yang berubah, terutama dengan meningkatnya persaingan antara kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik. Melalui diversifikasi kemitraan dan modernisasi militernya, Filipina berupaya memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan pertahanan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan berkontribusi secara efektif dalam keamanan regional.

The Means

Strategi Filipina untuk *capacity building* tidak hanya terbatas pada aliansi, tetapi juga meluas ke bidang modernisasi dan keterlibatan regional. Negara ini menyadari bahwa meningkatkan kemampuan pertahanannya memerlukan investasi dalam peralatan militer modern, kemajuan teknologi, dan peningkatan infrastruktur. Latihan militer bersama dan kerja sama bilateral atau dalam platform regional seperti ASEAN semakin memperkuat kemampuan pendekatannya. Inisiatif ini memupuk rasa persatuan di antara para pemain regional, memungkinkan mereka untuk secara kolektif mengatasi tantangan

keamanan bersama yang berasal dari persaingan kekuatan besar.

Strategi pembangunan kapasitas pertahanan Filipina merupakan pendekatan multidimensi yang melampaui aliansi tradisional. Strategi ini mencakup modernisasi militer, kemajuan teknologi, peningkatan infrastruktur, serta keterlibatan aktif dalam kerjasama regional. Filipina menyadari bahwa peningkatan kemampuan pertahanannya memerlukan investasi yang signifikan dalam peralatan dan teknologi militer terkini. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga memastikan bahwa angkatan bersenjata Filipina tetap relevan dan efektif dalam lingkungan keamanan yang berubah.

Selain itu, latihan militer bersama dan kerjasama bilateral atau multilateral, terutama dalam platform regional seperti ASEAN, menunjukkan komitmen Filipina terhadap pembangunan kapasitas kolektif di kawasan. Ini memperkuat kemampuan pendekatan Filipina dalam menghadapi tantangan keamanan bersama dan memperdalam hubungan dengan negara-negara tetangga. Inisiatif semacam ini juga berperan penting dalam memupuk rasa persatuan dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, yang penting dalam mengatasi tantangan keamanan yang timbul dari persaingan kekuatan besar.

Perkembangan ke depan yang mungkin terjadi dari strategi ini termasuk peningkatan kemampuan pertahanan Filipina, baik secara independen maupun dalam konteks kerjasama regional. Peningkatan ini akan meningkatkan kapasitas Filipina untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.

Keterlibatan yang lebih kuat di tingkat regional juga akan memperkuat posisi Filipina dalam negosiasi dan

kerjasama internasional, terutama dalam menghadapi isu-isu keamanan dan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Filipina tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan militernya, tetapi juga berupaya memainkan peran aktif dan konstruktif dalam diplomasi regional dan global.

Di antara banyak kerja sama pembangunan kapasitas pertahanan yang telah dijalin Filipina dengan banyak negara, di bawah ini disebutkan beberapa kerja sama, seperti: (Castillo, 2021)

- EDCA dengan A.S., yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan pengembangan kapasitas melalui latihan bersama, program pelatihan, dan pertukaran pengetahuan, juga untuk meningkatkan kerja sama militer dalam keamanan maritim serta meningkatkan kapasitas bersama dalam merespons keadaan darurat kemanusiaan.
- Latihan Balikatan dengan A.S., yang diadakan setiap tahun mencakup berbagai skenario, mulai dari bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana hingga operasi amfibi, dan membantu meningkatkan koordinasi dan kemampuan kedua angkatan bersenjata.
- Pengadaan pertahanan, di mana Filipina membeli dua kapal fregat, BRP Rizal dan BRP Luna, dari Korea Selatan. Korea Selatan juga memberikan Filipina sebuah kapal korvet, BRP Yap, yang sekarang dianggap sebagai salah satu kapal yang paling

berguna di angkatan laut Filipina.

- Modernisasi militer, di mana Jepang terus membantu peningkatan kemampuan militer Filipina melalui sumbangan pesawat terbang, sistem radar, dan kapal laut *multirole*.

Perkembangan yang mungkin terjadi dalam jangka pendek hingga menengah adalah peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan dan keamanan maritim Filipina. Dengan kerjasama melalui EDCA dengan Amerika Serikat dan latihan Balikatan tahunan, Filipina akan memperkuat interoperabilitas dan kemampuan operasional bersama, terutama dalam konteks keamanan maritim dan respon terhadap bencana.

Pengadaan kapal fregat dari Korea Selatan dan kapal korvet, serta modernisasi militer dengan bantuan Jepang, akan menghasilkan peningkatan substansial dalam kemampuan angkatan laut Filipina. Jangka panjang, ini bisa memperkuat posisi Filipina dalam menghadapi tantangan keamanan regional, seperti klaim teritorial di Laut Cina Selatan, dan meningkatkan kapasitas Filipina dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

Kerjasama ini juga dapat memperdalam hubungan Filipina dengan AS, Korea Selatan, dan Jepang, menunjukkan diversifikasi strategis dalam kemitraan pertahanan Filipina yang berpotensi meningkatkan pengaruh dan posisinya di kawasan Asia Pasifik.

SIMPULAN

Filipina menggunakan diplomasi pertahanan untuk mengelola persaingan A.S.-Tiongkok, menjaga aliansi dengan kedua negara sembari menyeimbangkan tujuan mereka yang berbeda. Negara ini memanfaatkan hubungan ekonominya

dengan Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* dan Jalan dan kemitraannya dengan Amerika Serikat melalui ekspansi EDCA. Dengan strategi ini, Filipina dapat mempertahankan kemandirian mereka dan mencegah ketergantungan yang terlalu besar pada salah satu dari kedua negara besar itu. Dan *defense capacity building* Filipina berpusat pada peningkatan kemampuan melalui partisipasi regional, modernisasi, dan aliansi.

DAFTAR PUSTAKA

Castillo, C. L. M. (2021). *EPB 2021-07 - NDCP*. National Defense College of the Philippines. <https://ndcp.edu.ph/epb-2021-07-2/>

Cotter, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford University Press for IISS.

Ebri, S. A. (2016). Motivasi Filipina Melakukan Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Dengan Amerika Serikat Dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) Tahun 2014. *JOM FISIP*, 3(2).

Gill, B., Goh, E., & Huang, C.-H. (2016). *The Dynamics of US-China-Southeast Asia Relations*. United States Studies Centre at the University of Sydney.

Goh, E. (2005). *Meeting the Tiongkok Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. East West Center.

Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., & Risma, H. (2021). Perang Semesta (Total War) Strategy for Preventing Terrorism Act (Study in Sultan Hasanuddin International Airport). *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 76-86. 10.31014/aior.1991.04.02.277

Johnsen, W.T. (2018). *Theory of War and Strategy (Course Directive)*. United States Army War College. <https://www.armywarcollege.edu/documents/Directives/AY18%20Theory%20of%20War%20&%20Strategy%20Core%20Course.pdf>

Kanni, W. (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. UNDP 64. <http://www.undp.org/capacity>

Koga, K. (2018). The Concept of "Hedging" Revisited: The Case of Japan's Foreign Policy Strategy in East Asia's Power Shift. *International Studies Review*, 20(4), 633-660. <https://doi.org/10.1093/isr/vix059>

Mehta, D. (2018). *Of Arms and Allies - India's Growing Military Diplomacy*. The MIT Post. <https://themitpost.com/arms-allies-indias-growing-military-diplomacy/>

OECD. (2011). *Perspectives Note: The Enabling Environment for Capacity Development*. <https://www.oecd.org/development/accountable-effective-institutions/48315248.pdf>

Pedrason, R. (2015). *ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community?* (PhD Dissertation). Universität Heidelberg.

Perwita, A. A. B., Gusmiarti, A. D., Hasmi, H. R., & Mahroza, J. (Eds.). (2022). *Defense Diplomacy for Capacity Building: A Conceptual Approach through Case Studies*. UNHAN RI Press.

Rabena, A. J. (2023, April 17). *From Duterte's "Pivot to China" to Marcos Jr.'s "Rebalance to the U.S."?* | FULCRUM. Fulcrum: Analysis on Southeast Asia. <https://fulcrum.sg/from-dutertes-pivot-to-china-to-marcos-jr-s-rebalance-to-the-u-s/>

Stromseth, J. (2019). *Don't Make Us Choose: Southeast Asia in the Throes of US-China Rivalry*. Foreign Policy at Brookings.

2018 National Security Strategy. (n.d.). Official Gazette of the Republic of the Philippines. <https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2018/08aug/20180802-national-security-strategy.pdf>

Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4), 3-43. <https://doi.org/10.2307/2538540>

Wang, T. Y., & Tan, A. C. (2021). Balancing, bandwagoning or hedging: Taiwan's strategic choices in the era of a rising China. *Political Science*, 73(1), 66-84. <https://doi.org/10.1080/00323187.2021.1967765>